

Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar)

Abdurrohman¹, Afifuddin,² Hirshi Anadza³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia, LPPM Unisma, Jl. MT Haryono, 65144
Indonesia.

Email: abdrohmanfikri@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang memberikan dampak terhadap individu, keluarga dan masyarakat, sehingga hal tersebut butuh diselesaikan demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Kabupaten Blitar telah melaksanakan kewajibannya yakni menanggulangi kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kemiskinan dari tahun 2016-2018 yakni 0,9 %, 0,8%, 0,8%. Pemerintah Kab. Blitar Terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang terdiri dari unsur pemerintah (Pemerintah Desa Plosorejo) dan swasta (Wisata Kampung Coklat), sehingga kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta dapat menjembatani terwujudnya penurunan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan diskriptif. Teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Kemudian teknik dalam analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan melalui CSR dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang tepat sasaran dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dikarenakan kegiatan tersebut bergerak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dengan adanya CSR dan pemberdayaan masyarakat tersebut perekonomian masyarakat Desa Plosorejo meningkat dan angka kemiskinan hanya 10,4%.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kolaborasi, Sinergisitas

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat, sehingga butuh untuk diselesaikan sedikit demi sedikit yang pada akhirnya kemiskinan dapat dipangkas dengan berbagai program sedemikian rupa oleh beberapa *stakeholder*. Adapun *stakeholder* disini adalah Pemerintah Desa Plosorejo yang kemudian berkolaborasi dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas. 2004) bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mengembangkan dan

mempertahankan kehidupan seseorang atau kelompok tersebut. Hak-hak dasar seseorang atau kelompok meliputi, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, rasa aman dari ancaman, serta hak berpartisipasi dalam sosial dan politik.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Hal ini tidak lepas dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mana pada Tahun 2018 terdapat beberapa kabupaten yang mengalami penurunan angka kemiskinan salah satunya Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.588.79 KM yang terdiri dari

pekarangan, sawah, perkebunan, tambak, tegal, kolam ikan dan lain-lain (BPS Kabupaten Blitar). Mengacu pada laporan yang di rilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan penurunannya. Di akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kabupaten Blitar hanya sebesar 9,72 persen (BPS Kabupaten Blitar).

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar mempunyai target pada 2021 angka kemiskinan sudah berada di titik terendah yakni sebesar 8,65 persen (RPJMD Kab. Blitar 2016-2021). Target tersebut kemudian menjadi tolak ukur untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan. Tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar ini memang sudah dirancang dalam RPJMD, sehingga Pemerintah Kabupaten terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai programnya dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah, dan swasta sehingga kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta dapat menjembatani terwujudnya penurunan angka kemiskinan.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta menurut pendapat Nijkamp (2002:1865) bahwa kolaborasi Pemerintah dan swasta adalah sebuah bentuk institusional dari pemerintah dan swasta yang berdasar pada sasaran awal, bekerja untuk mencapai target bersama, dan kedua belah pihak menerima resiko investasi yang berdasar pada kesepakatan bersama.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, perusahaan mempunyai program yang bisa diandalkan dalam menanggulangi kemiskinan yakni program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Program CSR secara sederhana adalah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri sebagai tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Disisi lain Pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan program CSR yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan" (UU Nomor 40 Tahun 2007). Melalui undang-undang ini, industri maupun perusahaan diwajibkan untuk melakukan program CSR.

Implementasi kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam rangka menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah pembentukan Pokmas (Puluhan anggota Kelompok Masyarakat) Pariwisata, programnya adalah membuat pasar desa wisata yang kemudian hal ini mendapatkan dukungan dari Pemerintahan Desa Plosorejo (Rofiq: 2016). Dengan dibangun pasar desa wisata tersebut, masyarakat Desa Plosorejo dapat menjual produk-produk lokal dari masyarakat Desa Plosorejo di pasar desa wisata tersebut. Dengan kata lain kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak Kampung Coklat sangat membantu untuk mengangkat ekonomi masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penurunan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Blitar dan adanya kolaborasi antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam penanggulangan kemiskinan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergisitas Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan?

Kajian Teori

A. Teori Kemiskinan

Menurut pendapat Sumodiningrat (1998) kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya ada 2 jenis. Pertama kemiskinan Kultural, kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi secara kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh kelompok masyarakat. Kedua kemiskinan struktural kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset yang tidak merata, terjadinya korupsi, kolusi serta ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan berjalan tidak optimal disebabkan program yang dijalankan

tidak menghasilkan outcome bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selain itu pendekatan yang digunakan adalah *Top-Down* yang mana segala sumber yang dikeluarkan berasal dari pemerintah (Atmas:2013). Pada awal reformasi, pemerintah merumuskan program-program pembangunan yang menggunakan pendekatan *Bottom-Up* yakni pembangunan dilakukan dari elemen masyarakat dalam arti pembangunan ini memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator, pembinaan, pengawasan dan yang memberikan dana.

B. Pembangunan *Bottom-Up* (dari bawah ke atas)

Menurut Suryono (2001, h 32) bahwa Pembangunan *Bottom-Up* ini dapat terwujud, harus mengembangkan beberapa prinsip yaitu. Pertama prinsip di desa, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memikirkan desanya dan pembangunan desanya, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, merumuskan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian di masukkan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pengenalan potensi yang masyarakat miliki. Ketiga dari setiap usulan dari masyarakat kemudian dirumuskan penanganan dan tindakan, tindakannya ada yang dari masyarakat itu sendiri, ada yang melalui bantuan pemerintah, dan ada yang harus ditangani oleh pemerintah secara langsung. Keempat perencanaan pembangunan *Bottom-Up* merupakan pendekatan perencanaan yang riil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendangan ini timbul karena dalam perencanaan *Bottom-Up* (dari bawah ke atas) dalam prosesnya di mulai dari pengenalan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berdampak secara langsung terhadap masyarakat.

C. Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Perusahaan

1. Kolaborasi

Kolaborasi adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan. Menurut pendapat Raharja (2008: 8) bahwa kolaborasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi guna untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai oleh individual. Berdasarkan defenisi di kolaborasi menurut

pendapat Raharja maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya organisasi otonom dalam arti mempunyai wewenang sendiri, dan melakukan kegiatan sendiri, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan. Keterbatasan dalam mencapai tujuan tersebut yang melatarbelakangi organisasi melakukan kolaborasi dengan organisasi lain atau individu lain.

Kolaborasi pemerintah dan perusahaan atau dikenal dengan *public private partnership* (PPP) menurut Grimsey dan Lewis (2004) karakteristik PPP antara lain. Pertama adanya partisipan, partisipan adalah pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Semua pihak yang terkait PPP harus memiliki komitmen dalam bekerjasama. Kedua sumber daya, setiap pihak dalam PPP harus mempunyai keterampilan tertentu yang berguna dalam hubungan kerja sama, sehingga kerja sama Saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Ketiga hubungan, dalam PPP hubungan menjadi hal yang harus dijaga, mengingat waktu pelaksanaan kerja sama yang berlangsung membutuhkan waktu yang lama. Keempat kontinuitas, kontrak kerja sama harus didasari oleh peraturan bagi para mitra dalam kerja sama.

Pada penelitian ini menggunakan karakteristik PPP karena ada keterlibatan swasta (perusahaan) dalam partisipan, masing-masing aktor dalam kolaborasi berperan sesuai dengan kapasitasnya. Pihak Pemerintah Desa Plosorejo berperan sebagai pemegang kebijakan dan regulasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, sedangkan swasta mempunyai kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan berupa program CSR perusahaan. Dalam implementasinya kedua belah pihak tersebut saling berperan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara maksimal.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 menjelaskan bahwa CSR merupakan komitmen Perseroan Terbatas untuk ikut serta dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perseroan sendiri maupun untuk masyarakat umum. Perseroan Terbatas ini dituntut oleh pemerintah untuk melakukan

tanggung jawab sosial terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan efek pencemaran dari perusahaan tersebut, baik dari pencemaran udara, air maupun berisik yang ditimbulkan perusahaan, maka dengan tuntutan pemerintah terhadap perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial ini agar masyarakat juga mendapatkan fasilitas dan sarana-prasarana dari perusahaan terkait.

Jenis-jenis CSR Menurut Edi Suharto (2010: 137) Jenis-jenis CSR ada empat antara lain. Pertama Pendidikan, Kedua kesehatan, Ketiga ekonomi, Keempat lingkungan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat secara konseptual menurut Suharto (2005 hl 598) bahwa pemberdayaan berasal dari kata 'Power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan merupakan kekuasaan seseorang, khususnya orang yang rentan dan lemah, sehingga dengan program pemberdayaan tersebut dapat membantu orang yang lemah dan rentan agar memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki kebebasan, dan dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka serta mendapatkan barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan ini ada beberapa langkah menurut pendapat Nugroho (2001 hl 195-197) yang harus diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin diantaranya. Pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan persyarikat mutlak untuk menanggulangi kemiskinan. tujuan pemberdayaan yang dilakukan ini untuk menekan perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin apabila berhadapan dengan struktur sosial dan politis secara langsung. Kedua setelah kesadaran kritis muncul, maka perlu dilakukan upaya pemutusan hubungan eksploitasi (pendayagunaan) terhadap orang miskin. Ketiga tanamkan rasa kesamaan. Keempat merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan orang miskin. Kelima dilakukan pembangunan sosial dan budaya bagi orang miskin. Keenam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara merata.

D. Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Perusahaan

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur serta bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergisitas ini dapat diartikan sebagai perpaduan unsur atau operasi gabungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sinergisitas dapat berjalan dengan baik jika dilakukan melalui dengan dua cara diantaranya. Pertama komunikasi, Pengertian komunikasi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007), bahwa komunikasi itu dibedakan menjadi dua bagian, komunikasi yang berorientasi pada sumber (manusia), adalah yaitu komunikasi dengan seseorang sungguh-sungguh memindah stimulasi agar mendapatkan tanggapan. Dan komunikasi yang berorientasi pada penerima, adalah semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulasi atau rangsangan.

Kedua koordinasi, dalam membangun sinergisitas memerlukan komunikasi yang baik, disisi lain juga sangat di perlukan koordinasi. Menurut Hasan yang dikutip dari jurnal Komunikasi Pemerintahan bahwasanya komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Maka dalam hal membangun sinergisitas, komunikasi dan koordinasi memang hal yang mutlak dalam artian komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergisitas adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan maksud untuk mendeskripsikan kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan. Lokasi Penelitian di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah. Pertama menemukan bentuk-bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo. Kedua menemukan kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan. Ketiga menemukan sinergisitas Pemerintahan Desa

Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam mananggulangi Kemiskinan

sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari nara sumber yang terdiri dari karyawan Wisata Kampung Coklat, perangkat desa dan masyarakat sekitar Wisata Kampung Coklat.

teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan verifikasi kesimpulan (Miles dan Huberman)

Pembahasan

1. Kondisi Desa Plosorejo dan Kondisi Perekonomian

Desa Plosorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Desa Plosorejo memiliki luas wilayah 8,41 Km² dengan ketinggian wilayah mencapai 137 meter dan memiliki kepadatan penduduk 915 Jiwa/Km². Adapun jumlah penduduk yang tercatat dalam data keluarga 2019 berjumlah 7.697 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 3.826 jiwa dan perempuan 3.871 jiwa, Sex Rasio 101.17.

Dari total jumlah penduduk di atas, penduduk yang tergolong miskin hanya 800 (KK), jadi jika di uraikan dalam bentuk persen jumlah penduduk miskin di Desa Plosorejo hanya 10.4 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan. Menurut data Desa Plosorejo perekonomian masyarakat Desa Plosorejo 80 persen memiliki mata pencaharian sebagai petani, selebihnya terdiri dari beberapa profesi diantaranya buruh tani, pegawai negeri sipil, pengrajin industri RT, pedagang keliling, peternak, dokter swasta, bidan, pension TNI/POLRI.

Belakangan ini Desa Plosorejo menjadi pusat perhatian masyarakat luas sejak berdirinya sebuah Wisata Kampung Coklat pada tahun 2014 yang di prakarsai oleh Gabungan Kelompok Tani (Guyub Santoso) sehingga para petani mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian mereka. Gapoktan Guyub Santoso pada dasarnya melakukan aktifitas budidaya kakao, jual beli kakao yang dikumpulkan dari petani dan juga pada usaha olahan coklat pada skala kecil.

Dengan adanya aktifitas tersebut, masyarakat banyak meminati untuk mengetahui proses pembuatan biji kakao menjadi olahan coklat, sehingga gabungan kelompok tani mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan kebun, gudang beserta lokasi pengolahan kakao tersebut dijadikan wisata untuk umum. Dengan adanya kawasan wisata tersebut masyarakat Desa Plosorejo yang awalnya mayoritas petani dan buruh tani dapat terangsang untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, serta bertambahnya lapangan pekerjaan baik di bidang pariwisata maupun di bidang perkebunan dan pertanian.

A. Profil Wisata Kampung Coklat

Pada tahun 2014 Kampung Coklat didirikan oleh Bapak Kholid yang kemudian dikembangkan menjadi Wisata Edukasi kampung Coklat yang bergerak di bidang pangan dan jasa. Kampung Coklat yang terletak di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar merupakan wisata edukasi yang berbasis natural dengan penyuguhan keindahan alam yang dijadikan ikon yaitu kakao, yang didalamnya dilengkapi dengan aktifitas budidaya kakao, mulai dari pembibitan, pemetikan, dan proses pengertian biji kakao hingga proses pengolahan menjadi coklat olahan.

B. Profil Perusahaan

1. Nama : Wisata Edukasi Kampung Coklat
2. Tanggal Berdiri : 17 Agustus 2014
3. NPWP : 75.462.329.6-653.000
4. Nomor SIUP : 503/00099/409.303/KPTSP-PM/VII/2016
5. Alamat Kantor : Jl. Banteng Blorok Nomor 18 Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab Blitar
6. Telepon : (0342) 807457/ 082220567818
7. E-mail : kampungcoklatblr@gmail.com
8. Website : www.kampungcoklat.com
9. Produk : Coklat, Tranding Biji Kakao dan Wisata edukasi.

C. Visi dan Misi Wisata Kampung Coklat

Wisata Kampung Coklat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang wisata edukasi atau agrowisata mempunyai visi yakni membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, berdaya saing, cerdas, mandiri dan sejahtera serta berkeadilan. Dalam rangka untuk menggapai

visi tersebut, Wisata Kampung Coklat mempunyai misi yakni, mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya komoditas kakao di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan produksi kakao dan olahan coklat Indonesia, menumbuhkan generasi penerus yang peka terhadap kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah coklat terlezat di dunia.

2. Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan, menurut Kepala Urusan Desa Plosorejo yakni Bapak Giyono,

“sampai saat ini kolaborasi antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata kampung Coklat berupa pelatihan warga Desa Plosorejo dalam pembudidayaan kakao, kolaborasi tersebut meliputi persetujuan antara kedua belah pihak yang mana Wisata Kampung Coklat sebagai organisasi yang bergerak langsung dalam menanggulangi kemiskinan melalui CSRnya, sedangkan Pemerintah Desa sebagai pemegang kebijakan untuk menyetujui kegiatan CSR tersebut, namun tidak semua kegiatan CSR di laporkan ke pihak Desa, pihak Desa pun tidak mengapa dengan hal itu ”

Selain itu menurut Luluk Z juga berpendapat terkait kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan,

“selama ini mas, kolaborasi yang dilakukan Wisata Kampung Coklat dengan Pemerintah Desa Plosorejo diantaranya mas, pada tahun 2017 kita mendirikan pasar Desa Wisata yang mana lahannya disediakan pihak Pemerintah Desa, masyarakat sekitar dapat berjualan di tempat yang sudah disediakan, sebagian masyarakat juga ada yang menjadi tukang parkir dan usaha-usaha lainnya”

Hal ini serupa juga disampaikan oleh Bu Lis sebagai masyarakat Desa Plosorejo sekaligus pedagang di pasar Desa Wisata tersebut, menurutnya

“iya mas setelah ada pasar Desa Wisata yang lahannya di sediakan oleh Pemerintah Desa,

masyarakat sekitar mendapat imbasnya dengan bisa berjualan di pasar tersebut. Produk yang dijual di pasar ini ya hasil dari produk masyarakat juga, jadi lumayan membantu ibu-ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Plosorejo yang merupakan pemegang kebijakan di Desa Plosorejo dalam rangka menanggulangi kemiskinan berkolaborasi dengan Wisata Kampung Coklat. Hal ini berdasarkan informan 3 yang menyatakan bahwa dalam kegiatan CSR mengenai pembangunan pasar desa yang di lakukan oleh pihak Wisata Kampung Coklat di respon dengan baik oleh pihak Pemerintah Desa dengan tindakan yang nyata yakni dengan menyediakan lahan untuk pembangunan pasar desa.

Kolaborasi sendiri mempunyai arti sebuah instrument yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan. Keterbatasan tersebut yang dialami oleh sebuah organisasi dapat di selesaikan dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi lain sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan pada hasil wawancara digolongkan menjadi dua bagian antara lain kolaborasi di bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi di bidang kegiatan CSR.

Pertama kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat melalui CSR diantaranya adalah Wisata Kampung Coklat membeli dan menyewa lahan milik masyarakat sekitar untuk dijadikan perluasan lahan. Wisata Kampung Coklat. sejak awal berdiri Wisata Kampung Coklat tidak mempunyai lahan yang luas, lahan yang dimiliki hanya tanah sebelah rumah pemilik Kampung Coklat, dengan berjalannya waktu banyak di minati wisatawan sehingga butuh melakukan perluasan lahan, perluasan lahan Wisata Kampung Coklat tersebut di support oleh masyarakat dengan merelakan tanahnya untuk di beli dan di sewa pihak Wisata Kampung Coklat.

Kedua kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan pasar desa dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat melalui CSR dan di dukung oleh pihak Pemerintah Desa Plosorejo dengan menyediakan lahan yang

digunakan untuk membangun pasar desa tersebut. Pada awal mula berdirinya Wisata Kampung Coklat tidak mendirikan pasar desa, namun pasar desa tersebut perlu untuk di bangun terkait pengunjung Wisata Kampung Coklat semakin hari semakin bertambah, dengan tujuan pembangunan pasar desa tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Melalui bantuan lahan dari Pemerintah Desa untuk di jadikan lahan pembangunan pasar desa, Pemerintah Desa mendirikan Pokmas Pariwisata berkolaborasi dengan Wisata kampung Coklat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan kebijakan bebas berjualan di tempat tersebut. Pasar desa yang didirikan pihak Wisata Kampung Coklat tepat di depan Wisata Kampung Coklat sehingga tempat tersebut sangat strategis dan dapat membantu masyarakat sekitar mencari biaya hidup.

Ketiga kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat adalah pelatihan para petani coklat yang tentu sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa. Pemberdayaan para petani ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian sebagai petani merupakan profesi sebagian besar masyarakat Desa Plosorejo, menurut data Desa Plosorejo jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani mencapai 80 persen, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat sangat berguna melihat kondisi perekonomian masyarakat yang pada umumnya mempunyai profesi sebagai petani.

Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan Wisata Kampung Coklat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan terhadap petani untuk meningkatkan hasil pendapatan dan meningkatkan kualitas kakao yang dihasilkan para petani ini. Sementara itu para petani juga merasa sangat terbantu dengan adanya kelompok tani (Gapoktan) yang bergerak dibidang pembinaan dalam meningkatkan hasil biji kakao yang berkualitas, dan bergerak dibidang pemasaran. sehingga dengan adanya Gapoktan ini kesejahteraan petani kakao semakin meningkat khususnya di Desa Plosorejo dengan kata lain jumlah angka kemiskinan akan menurun.

Keempat kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat adalah pemanfaatan lahan parkir, dalam pemberdayaan masyarakat yang berupa pemanfaatan lahan parkir ini telah disetujui pihak Pemerintah Desa sehingga sangat membantu masyarakat sekitar khususnya yang punya lahan di sekitar Wisata Kampung Coklat, karena selama ini Wisata Kampung Coklat tidak menyediakan lahan parkir khusus para pengunjung Wisata kampung Coklat, lahan parkir tersebut sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sekitar. Hal ini menjadi peluang baru bagi Coklat untuk membangun perekonomian mereka. Pihak Wisata kampung Coklat telah membebaskan masyarakat sekitar untuk menyediakan lahan parkir bagi para pengunjung Wisata Kampung Coklat yang mana semakin hari semakin meningkat. Sehingga dengan meningkatnya pengunjung Wisata Kampung Coklat maka penghasilan masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahannya sebagai parkir juga meningkat.

Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dengan sendirinya penduduk miskin di Desa Plosorejo akan menurun, hal tersebut yang merupakan tujuan utama dalam menanggulangi kemiskinan. penurunan kemiskinan yang merupakan kewajiban setiap stakeholder akan mudah terwujud apabila kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dibangun dengan baik antar stakeholder.

Dari data-data yang telah diuraikan diatas dapat di simpulkan bahwa kemiskinan di Desa Plosorejo merupakan kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia diantaranya, kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan pihak tertentu yang disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam bersaing untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sumodiningrat (1998) bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi yang tidak merata, terjadi korupsi, dan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Kemiskinan struktural menurut Atmas Ras (2013) dapat di selesaikan dengan dua program, yakni pembangunan *Top-Down* dan pembangunan *Bottom-Up*. Pembangunan *Top-*

Down merupakan program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi tidak lagi digunakan dan di ganti dengan program pembangunan *Bottom-Up* yakni pembangunan yang dilakukan dari elemen masyarakat, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Teori ini sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Desa Plosorejo yang pembangunan dari bawah yakni pembangunan sesuai dengan ansiprasi dan kreatifitas masyarakat.

Analisis Data Penelitian

1. Kemiskinan di Desa Plosorejo

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, kemiskinan yang terjadi Desa Plosorejo tergolong jenis kemiskinan struktural karena kemiskinan di Desa Plosorejo di sebabkan oleh faktor-faktor yang di buat oleh manusia, seperti kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu, dll. Hal ini menyebabkan ketidak berdayaan masyarakat untuk bersaing dalam meningkatkan ekonomi, sehingga pendapatan masyarakat menurun dan akan mempengaruhi peningkatan penduduk miskin.

Masyarakat Desa Plosorejo pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, menurut data desa hingga 80 persen masyarakat Desa Plosorejo bekerja sebagai petani. Masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani rentan terhadap kemiskinan di sebabkan penghasilan yang mereka dapatkan cenderung musiman, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembudidayaan tanaman akan menyebabkan gagal panen, hal ini akan mempengaruhi pendapatan para petani, dengan kata lain permasalahan kemiskinan tidak dapat diselesaikan.

Sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (1998) bahwa kemiskinan ditinjau dari faktor penyebabnya ada dua jenis, pertama kultural, kemiskinan jenis kultural merupakan kemiskinan yang terjadi secara kultur, atau kemiskinan yang terjadi karena budaya maupun adat istiadat yang dianut oleh kelompok masyarakat, yang mana mereka sudah merasa cukup dengan keadaan mereka namun secara umum mereka tergolong orang yang miskin.

Kedua struktural, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-

faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset yang tidak merata, terjadi korupsi, kolusi, dan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Kemiskinan struktural ini menurut menurut Atmas Ras (2013) dalam penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua metode yakni dengan pembangunan *Top-Down* dan pembanguan *Bottom-Up*.

Pada masa Orde Baru, upaya yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan memakai pembangunan *Top-Down* yakni penanggulangan kemiskinan semua tersentral pada Pemerintahan Pusat. Akibatnya program penanggulangan kemiskinan tidak optimal dikarenakan program yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat sehingga program pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Sementara itu, pada masa Reformasi pemerintah merumuskan program-program pembangunan menggunakan pendekatan *Bottom-Up* yakni pembangunan dilakukan dari bawah, dalam arti pembangunan dilakukan dari hasil ansiprasi, kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat. Program pembangunan *Bottom-Up* dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung sehingga pembangunan berjalan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

2. Pembangunan *Bottom-Up*

Pembangunan *Bottom-Up* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat ini sesuai dengan pendapat Alisyabana (2003) bahwa pembangunan *Bottom-Up* adalah inovasi pembangunan yang berasal dari bawah guna untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembangunan. Desa Plosorejo dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang menjadi permasalahan sosial dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di mulai dari bawah, diantaranya adalah kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat yang berupa kegiatan CSR dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program CSR dan pemberdayaan ini masyarakat Desa Plosorejo khususnya para petani sangat terbantu untuk meningkatkan pendapatan para petani, sehingga kemiskinan di Desa Plosorejo

dengan program pembangunan dari bawah dapat menurunkan angka kemiskinan.

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan *Bottom-Up* ini memposisikan masyarakat sebagai aktor pembangunan, karena pembangunan yang dilakukan berdasarkan pada pemikiran, ide atau kreatifitas masyarakat sehingga tepat sasaran dan pembangunan di laksanakan sesuai apa yang di perlukan masyarakat. Masyarakat Desa Plosorejo yang merupakan berpenghasilan 80 persen petani sehingga dalam pembangunan yang dilakukan terdapat pemberdayaan masyarakat yakni pelatihan sehingga para petani dapat meningkatkan hasil panen mereka dengan maksimal.

Dengan meningkatnya hasil panen yang didapat petani, maka pendapatan para petani juga akan meningkat, sehingga kemiskinan di Desa Plosorejo akan mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan merupakan upaya Pemerintah Desa dan Wisata Kampung Coklat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Plosorejo sesuai dengan pembukaan UU 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “tujuan negara hukum Indonesia adalah melindungi bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keidupan berbangsa, serta ikut andil dalam ketertiban dunia”.

Pemerintah Desa Plosorejo sebagai pihak yang memegang kebijakan dan regulasi di Desa Plosorejo, mempunyai kewajiban untuk mewujudkan UU 1945 tersebut. Sedangkan Wisata Kampung Coklat sebagai pihak swasta (perusahaan) mempunyai tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, sehingga kedua stakeholder tersebut sama-sama mempunyai kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Desa Plosorejo.

3. Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan

Kolaborasi merupakan sebuah instrument yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan. Keterbatasan organisasi untuk mencapai tujuan dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih maksimal. Dalam hal ini kolaborasi antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan pihak Wisata Kampung Coklat yang

merupakan perusahaan swasta yang berada di Desa Plosorejo dalam menanggulangi kemiskinan merupakan kolaborasi yang di kenal dengan *public private partnership* (PPP). Menurut pendapat Grimsey dan Lewis (2004) tentang karakteristik PPP antara lain. Pertama adanya partisipan, yakni pihak pemerintah dan swasta harus sama-sama memiliki komitmen dalam bekerjasama. Kedua memiliki sumber daya, setiap pihak dalam PPP harus memiliki keterampilan tertentu yang berguna dalam bekerjasama, sehingga kerjasama saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ketiga hubungan, dalam PPP hubungan menjadi hal yang harus dijaga, karena dalam bekerjasama membutuhkan waktu yang lama. Keempat kontinuitas, kontrak kerjasama harus didasari oleh peraturan bagi para mitra.

Dari pendapat tersebut ada keterkaitan dengan PPP yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan antara lain. Pertama partisipan antar kedua belah pihak, Pemerintah Desa Plosorejo sebagai pemegang kebijakan di Desa Plosorejo memiliki komitmen dengan Wisata Kampung Coklat sebagai pihak swasta untuk mensejahterakan rakyat dengan menanggulangi kemiskinan. Kedua belah pihak sama sama memiliki sumber daya, Pemerintah Desa Plosorejo memiliki keterampilan dalam bidang regulasi dan penyedia lahan sedangkan Wisata Kampung Coklat keterampilannya dalam bidang pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan para petani dan pembangunan pasar desa. Ketiga kedua belah pihak memiliki hubungan, dalam hal ini kolaborasi antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat berjalan dengan baik. Keempat kontinuitas, hingga saat ini kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan tetap berjalan yang berupa CSR maupun pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Wisata Kampung Coklat.

A. Corporate Social Responsibility

CSR merupakan sebuah konsep tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. Kolaborasi Wisata Kampung Coklat dengan Pemerintah Desa Plosorejo dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo diantaranya berupa CSR. CSR yang dilakukan Wisata Kampung Coklat merupakan sebuah

komitmen perusahaan yang telah diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial. perusahaan sudah tidak hanya memikirkan profit saja melainkan perusahaan harus memikirkan lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.

Dalam hal ini Wisata Kampung Coklat telah melakukan kewajibannya dalam memenuhi tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan CSR. Kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat sejalan dengan pendapat Edi Suharto (2010) yang menjelaskan bahwa jenis-jenis CSR ada empat, CSR di bidang pendidikan, CSR di bidang kesehatan, CSR di bidang ekonomi, CSR di bidang lingkungan.

Adapun bentuk-bentuk CSR Wisata Kampung Coklat di bidang pendidikan yakni berupa beasiswa terhadap anak-anak Desa Plosorejo dan karyawan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, anak yatim piatu. Dan juga Wisata Kampung Coklat menjadi donatur di lembaga pendidikan An- Harul Ulum yang dijadikan tempat pendidikan anak-anak yang mendapatkan beasiswa dari Wisata kampung Coklat. Di bidang kesehatan, Wisata Kampung Coklat memberikan jaminan kesehatan terhadap karyawan yang bekerja di Wisata Kampung Coklat dan bantuan terhadap kaum duafa' baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan. Bantuan ini sangat di butuhkan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu baik dalam ekonomi mereka maupun biaya kesehatan mereka.

Di bidang ekonomi, CSR yang dilakukan oleh Wisata kampung Coklat berupa peluang bagi masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan di Wisata kampung Coklat sesuai dengan skill yang masyarakat miliki, kemudian masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan yang masyarakat miliki untuk dijadikan usaha seperti kuliner, toilet umum, dan lahan parkir, peluang ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Wisata kampung Coklat juga melakukan kegiatan CSR berupa pembangunan pasar desa yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk berdagang, berjualan hasil kreatifitas masyarakat sendiri yang kemudian dengan dibangunnya pasar desa ini untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan di Desa Plosorejo mengalami penurunan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah konsep untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan rentan guna untuk membantu masyarakat yang rentan dan lemah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut pendapanat Suharto (2005) bahwa pemberdayaan berasal dari kata "power" yang memiliki arti kekuasaan atau keberdayaan. Sehingga dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat memberi kekuatan atau keberdayaan masyarakat yang tidak mampu.

Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat terhadap masyarakat Desa Plosorejo diantaranya. Pertama menyewa dan membeli lahan masyarakat untuk perluasan Wisata Kampung Coklat. Dalam pemberdayaan ini Wisata Kampung Coklat memberikan peluang pada masyarakat sekitar khususnya yang memiliki lahan di sekitar Wisata Kampung Coklat, untuk dijual atau di sewakan terhadap Wisata Kampung Coklat dengan harga yang lebih tinggi di banding di jual pada orang lain, sehingga pendapatan masyarakat sekitar bertambah. Hal ini dapat membantu masyarakat Desa Plosorejo untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa Plosorejo.

Kedua pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan pasar desa yang dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Plosorejo guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Plosorejo. Masyarakat desa yang sebelumnya hanya bekerja sebagai petani dan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, dengan dibangunnya pasar desa tersebut masyarakat memiliki peluang untuk berjualan hasil kreatifitas masing-masing untuk di jual di pasar desa. Hal ini dapat membantu penghasilan masyarakat sekitar sehingga perekonomian mereka membaik dan tentunya kemiskinan di Desa Plosorejo juga akan menurun.

Ketiga pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan pembudidayaan kakao dan pembagian bibit kakao secara gratis. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Plosorejo

yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani. Pembagian bibit gratis yang dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat terhadap masyarakat Desa Plosorejo merupakan bentuk motivasi bagi masyarakat khususnya yang petani untuk lebih semangat lagi, tidak cukup sampai disitu hasil panen para petani juga dapat dijual kembali ke Wisata Kampung Coklat untuk diolah menjadi bahan olahan coklat. Kegiatan ini dapat membantu para petani untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga terselamatkan dari garis kemiskinan.

Keempat pemberdayaan masyarakat berupa pemanfaatan lahan parkir, Wisata Kampung Coklat dari awal berdiri tidak menyediakan lahan parkir semua sudah di serahkan kepada masyarakat sekitar yang sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa. Masyarakat sekitar Wisata Kampung Coklat khususnya yang memiliki lahan sekitar Wisata Kampung Coklat dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir guna untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka.

4 Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan

Menurut pendapat Najiyati dan Rahmat (2011) bahwa sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur serta bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar. Pendapat ini mengartikan sinergi sebagai unsur gabungan atau operasi gabungan yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih guna untuk memperoleh hasil atau output yang lebih baik dan lebih besar. Keberhasilan dalam sinergisitas ini harus terpenuhi dua unsur yakni komunikasi dan koordinasi.

A. Komunikasi

Sinergisitas akan terjadi apabila komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sementara itu komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007) bahwa komunikasi itu dibedakan menjadi dua bagian yakni komunikasi dengan seseorang sungguh-sungguh memindah stimulasi agar mendapat tanggapan dan komunikasi yang berorientasi pada penerima artinya semua kegiatan dimana penerima menanggapi stimulasi atau rangsangan.

Komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Desa Plosorejo dan Wisata Kampung Coklat

dalam menanggulangi kemiskinan sudah efektif, meskipun ada sebagian kecil kegiatan Kolaborasi yang tidak dikomunikasikan namun tidak mempengaruhi terhadap hasil penanggulangan kemiskinan di Desa Plosorejo, hal ini terlihat pada hasil data wawancara dengan Ketua Urusan Desa Plosore bahwa tidak semua CSR yang dilakukan Wisata Kampung Coklat dikomunikasikan terhadap pihak Pemerintah Desa Plosorejo namun demikian Pemerintah Desa Plosorejo tidak mengapa dengan hal tersebut.

B. Koordinasi

Koordinasi yang terjadi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat berupa hubungan langsung yakni pihak Wisata Kampung Coklat dalam rangka melakukan kegiatan CSR di Desa Plosorejo melakukan hubungan pribadi secara langsung dengan Pemerintah Desa Plosorejo baik CSR yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun CSR yang lain.

Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Meekijat (1994) bahwa dalam mewujudkan sinergisitas yang efektif maka harus melalui 9 (sembilan) syarat antara lain hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan supervise yang efektif. Pendapat ini menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mewujudkan sinergisitas yang efektif.

Berdasarkan teori ini maka sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan terkait keefektifan sinergi masih tergolong rendah karena koordinasi yang dilakukan hanya berupa hubungan langsung secara pribadi, tujuan yang jelas yakni menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo dengan melakukan CSR pemberdayaan masyarakat. Namun demikian tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo, hal ini dibuktikan dengan jumlah kemiskinan hanya 10,4 persen. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tujuan bersama Pemerintah Desa Plosorejo dan

Wisata Kampung Coklat yakni kesejahteraan masyarakat Desa Plosorejo.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan mengenai Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Kemiskinan yang terjadi di Desa Plosorejo merupakan kemiskinan jenis struktural disebabkan kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh faktor manusia, sehingga dalam penanggulangannya dapat di tempuh dengan program pembangunan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Namun setelah Reformasi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan *Bottom-Up* karena belajar dari masa Orde Baru yang menggunakan pembangunan *Top-Down* tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Pembangunan *Bottom-Up* menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berkolaborasi dengan Wisata Kampung Coklat yakni melalui kegiatan CSR dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah menyewa lahan milik masyarakat sekitar untuk dijadikan perluasan lahan Wisata Kampung Coklat. Kedua pembangunan pasar desa. Ketiga pelatihan pembudidayaan kakao bagi para petani di Desa Plosorejo. Keempat pemanfaatan lahan parkir Dengan adanya kolaborasi Pemerintah Desa dengan Wisata kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan maka dari kedua pemangku kepentingan perlu adanya sinergisitas untuk memaksimalkan dala kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Plosorejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo masih tidak sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan ada sebagian kegiatan CSR dan pemberdayaan yang tidak dikomunikasikan dan koordinasikan dengan pihak Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi terhadap kesinergian antar kedua pemangku kepentingan tersebut. meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi

terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan di Desa Plosorejo.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Alisyabana, 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta.
- Fendt, Thomas Christian. 2010. *Introducing Elektronik Suplly Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industrie*. Berlin
- Grimsey, D. & Lewis, M. K. (2004). *Public Private Partnership : The Worldwide Revolution in Infrastructu*. Edward Elgar
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, Dan Humaniora*. Yogyakarta
- Nijkamp, Peter. 2002. *A Corporative Institutional Evaluation of Public-Private Partnership in Dutch Land-use and Revitalisation Project*. Urban Studies.
- Raharja, Sam'un Jaja. 2008. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Depok: Universitas Indonesia.
- R.E. Freidman. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach, Fitman*. Boston
- Suharto Edi . 2010. *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung. Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998, *Membangu Prekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suryono, Agus. 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Malang Press, Malang
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergisitas Instansi Pemerintah Dalam Pebangunan Kota Terpadu Mandiri*. Jurnal Ketransmigrasian.
- Ras Atmas. 2013. Universitas Hasanuddin. Jurnal dengan judul Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan .
- Bappenas 2004. Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Melenium Indonesia 2004
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019 *Data Informasi Kemiskinan* . Jawa Timur <https://www.jatim.bps.go.id> > 2017/07/19

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar*. Kabupate Blitar
<https://www.blitarkab.go.id>

Rofiq Ainur. Wisata Kampung Coklat Angkat Ekonomi Warga Desa Plosorejo / Jatim Times <https://www.jatimtimes.com> diakses 29 September 2016

Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang tujuan negara hukum Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial